

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berprinsip pada pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, maka setiap daerah otonom mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Otonomi daerah akan memberi dampak pada pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam pengelolaannya dan akan memberi wewenang dan memunculkan tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah termasuk tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada publik.

Sukhemi (2011) menyatakan tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan *Good Government Governance*. Adapun kriteria yang harus ada untuk tercapainya *Good Government Governance* salah satunya dengan dilakukannya transparansi. Medina (2012) berpendapat bahwa transparansi merupakan isu utama dalam pemerintahan yang demokratis dan pemerintahan yang demokratis membutuhkan akuntabilitas kepada publik guna meningkatkan transparansi dalam menungkapkan lebih banyak informasi.

Transparansi sangat diperlukan karena masyarakat saat ini sudah semakin kritis yang ingin mengetahui kinerja dari pemerintah. Masyarakat ingin mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah dan bagaimana cara pemerintah dalam mengurus daerahnya semenjak otonomi daerah berlangsung. Di sisi lain, banyak pihak yang berkepentingan seperti investor dan wisatawan yang memerlukan informasi tentang daerah yang akan dijadikan objek investasi dan objek rekreasi. Dalam konteks *stakeholder theory*, Roberts (1992) dalam Martani dkk. (2013) yang menyatakan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan ini, tentunya memerlukan informasi yang berbeda-beda, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan semakin banyak informasi yang dibutuhkan masing-masing pihak.

Pemerintah bisa melakukan transparansi dengan mendapatkan keuntungan lain, karena pada dasarnya pemerintah daerah juga ingin diakui eksistensinya dan pengakuan sebagai penanggung jawab, pemimpin, pengelolaan aset dan kekayaan daerah. Pemerintah daerah mengharapkan masyarakat dapat mengakui kinerja yang baik dari pemerintah dan mengakui pemerintah mampu mengurus dan bertanggung jawab kepada daerahnya sendiri dengan baik dan benar sehingga penerapan transparansi terhadap publik itu hanya akan bersifat formalitas yang tujuannya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari publik, seperti yang dikutip oleh Richardson (1997) dalam Martani dkk. (2013) bahwa hal ini seperti Teori Legitimasi (*legitimacy theory*) dimana organisasi

harus berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat agar mendapatkan legitimasi sebagai pemimpin.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat sendiri sudah dijelaskan dalam Teori Agensi. Pemerintah sebagai pengembang amanah (*agent*) dan masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai kepentingannya masing-masing. Afransyah (2013) menyatakan bahwa para pejabat pemerintah daerah akan berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dalam *website* penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemda dan sudah menjadi keharusan untuk menghindari asimetri informasi dan konflik berkepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam rangka menghindari asimetri informasi dan konflik kepentingan maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan transparansi, salah satunya secara *online*.

Pada era informasi, penggunaan media internet untuk menyampaikan informasi berkembang sangat pesat dan sudah tidak terpungkiri lagi bahwasanya saat ini internet sudah menjadi kebutuhan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet melalui *website* untuk menunjang kinerja dari pemerintah di Indonesia sudah di mulai sejak beberapa tahun yang lalu, baik secara nasional atau di daerah lembaga-lembaga pemerintah. Pemerintah daerah sudah memulai melakukan pembenahan terhadap *website* dan berusaha untuk memaksimalkan untuk pelayanan terhadap publik. Melalui *website* resmi

pemerintah daerah dapat mempermudah masyarakat untuk berinteraksi dan dapat mempermudah pemerintah untuk menyebarluaskan informasi lebih efektif dan efisien.

Pada kenyataannya saat ini hampir semua pemerintah daerah memiliki *website*, tentu dengan kualitas yang berbeda dimana *website A* tidak akan sama dengan *website B*. Masih saja ada pemerintah daerah yang mengungkapkan informasi sekenannya, dimana informasi yang diungkapkan hanya informasi yang secara umum seperti visi misi, geografi, informasi tentang objek wisata dll, dan ada juga pemerintah daerah yang menyediakan informasi namun tidak dapat dibuka atau informasi tersebut kosong. Namun diantara semua itu, sudah ada juga pemerintah daerah yang telah memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan dengan mengungkapkan informasi secara spesifik dan berkesinambungan.

Dalam rangka merespon adanya perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Inpres no.3 tahun 2003, dimana Presiden telah mengeluarkan instruksi mengenai strategi dan kebijakan *e-Government*. Menurut Muhammad (2012) menyatakan bahwa dengan adanya *e-Government* dapat membuka peluang untuk membuka informasi yang dimiliki suatu pemerintahan untuk mempermudah akses masyarakat terutama informasi yang ada baik dalam informasi keuangan dan non-keuangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah di Indonesia dan pengaturan Menkominfo no.26 tahun 2006 mengenai penggunaan nama domain go.id pada situs

resmi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dengan adanya aturan-aturan yang terkait dan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan *website* pemerintah daerah dan meningkatkan kebutuhan publik yang sudah menuntut adanya transparansi. Sudah seharusnya *website* resmi pemerintah daerah dapat diperhatikan dan digunakan sebaik mungkin, dan bukan lagi sekedar profil statis pemerintah yang *go - online* namun harus menjadi sekumpulan informasi, dokumen dan data yang dinamis dan aktual sehingga berguna bagi masyarakatnya.

Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini dikarenakan masih sedikit penelitian yang berkaitan dengan transparansi dalam *website* resmi pemerintah daerah yang bersifat pelayanan publik atau non-keuangan. Peneliti akan mencoba mengambil sampel *website* Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, karena yang kita tahu bahwa Jawa Barat dan Banten adalah salah satu Provinsi yang dekat dengan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota dari Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi tersebut lebih sering menggunakan *website* karena kebanyakan orang-orang yang tinggal di Provinsi yang dekat dengan Ibu Kota dan tinggal di Ibu Kota adalah orang-orang yang modern yang lebih mengandalkan untuk *searching* di internet. Selain itu peneliti juga ingin memperoleh bukti empiris hal-hal yang dapat mempengaruhi transparansi non-keuangan dalam *website* pemda.

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat menggambarkan seseorang

mempunyai wawasan, pengetahuan, dan kemampuan yang berbeda-beda tergantung dari seberapa jauh seseorang tersebut menempuh jenjang pendidikan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi non-keuangan dalam *website* resmi pemda (Martani dkk. 2013).

Faktor kedua yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk juga dapat menggambarkan kompleksitas suatu daerah. Ingram (1984) dalam Puspita (2012) mengungkapkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan yang diproksikan dengan jumlah penduduk dapat memberikan dorongan kepada pemda untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya. Semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah maka semakin besar pula tekanan yang diberikan kepada pemerintah untuk melakukan transparansi.

Faktor ketiga adalah kemampuan keuangan daerah, banyaknya inovasi yang dilakukan sebuah daerah baik dalam segi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik tentu sejalan dengan kemampuan sebuah daerah terutama dalam hal ekonomi dan keuangan. Hilmi (2012) mengungkapkan bahwa kekayaan suatu daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintahan. Sejalan dengan penelitian Martani dkk. (2013) yang mengungkapkan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam *website*.

Faktor keempat yaitu tingkat kemandirian daerah, dalam rangka menjalankan otonomi daerah maka setiap daerah bertanggung jawab atas urusan rumah tangganya sendiri dan pengelolaan daerah. Untuk mengukur mandiri atau tidaknya suatu daerah adalah dengan melihat besar atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD), sehingga dengan PAD yang besar seharusnya pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mempublikasikan pengungkapan informasi terkait realisasi anggaran atas PAD yang diperoleh dari masyarakatnya. Laswad *etal.* (2005) dalam Medina (2012) yang mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian menunjukkan kemampuan suatu daerah dari sumber-sumber PAD untuk membiayai pengeluaran operasional daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor kelima yaitu jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jumlah SKPD juga bisa menggambarkan kompleksitas pemerintahan. Jumlah SKPD menggambarkan banyaknya kegiatan yang dilakukan di suatu daerah sehingga pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab dengan memberikan informasi terkait dengan kegiatan dan kinerja dari pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu dan mengetahui sejauh mana pemerintah daerah di Jawa Barat menggunakan *website* resminya dalam menyajikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang telah dilakukannya. Penelitian ini bersifat replikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh

Martani dkk. (2013). Ada beberapa perbedaan di dalamnya, diantaranya di dalam penelitian ini saya akan menambahkan satu variabel yaitu jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diprediksi terkait dengan pengungkapan informasi non-keuangan di *website* resmi pemerintah daerah dan sampel penelitian *website* kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Banten.

B. Batasan Masalah Penelitian

Terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan informasi non-keuangan dalam website resmi pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat pendidikan, jumlah penduduk, tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah dan jumlah SKPD.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka dibuat beberapa rumusan masalah yang terkait, yaitu :

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda?
2. Apakah jumlah penduduk suatu daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda?
3. Apakah kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda?
4. Apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda?

5. Apakah jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda?

D. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh positif tingkat pendidikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda.
2. Pengaruh positif jumlah penduduk suatu daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda.
3. Pengaruh positif kemampuan keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda.
4. Pengaruh positif tingkat kemandirian daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda.
5. Pengaruh positif jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan informasi non-keuangan dalam website Pemda.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan berguna dalam penyajian informasi non-keuangan di Pemerintah Daerah.

4. Publik

Dengan adanya penelitian ini maka publik dapat mengetahui pemerintah daerah mana saja yang memberikan informasi di dalam situs atau website resmi Pemerintah Daerah.